

**ANALISIS TREND PERAMALAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI DINAS PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2008-2012**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**HERMANTO PANDEHOTMAN**

**C1B010004**

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN MANAJEMEN**

**2014**

**ANALISIS TREND PERAMALAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI DINAS PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2008-2012**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Universitas Bengkulu  
Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi



Oleh

**HERMANTO PANDEHOTMAN**

**C1B010004**

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN MANAJEMEN**

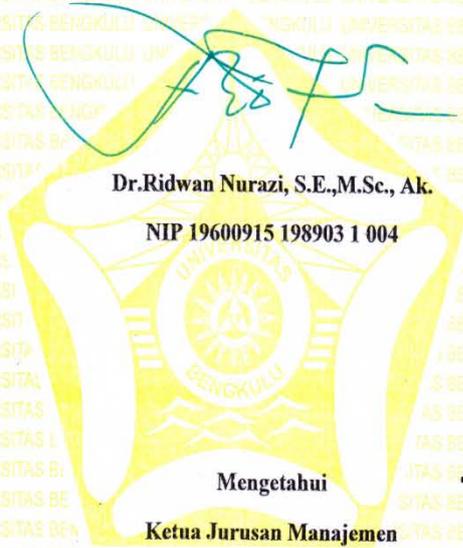
**2014**

Skripsi oleh Hermanto Pandehotman ini

Telah diperiksa oleh pembimbing dan disetujui untuk diuji pada ujian  
*Comprehensive*/ Skripsi

Bengkulu : Februari 2014

Pembimbing



**Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Ak.**

**NIP 19600915 198903 1 004**

Mengetahui

**Ketua Jurusan Manajemen**

**Dr. Drs. Syaiful Anwar, AB., S.U**

**NIP 19571010 198403 1 004**

Skripsi oleh Hermanto Pandehotman ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Yang Dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Februari 2014

Waktu : 08.00 WIB

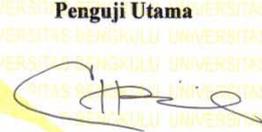
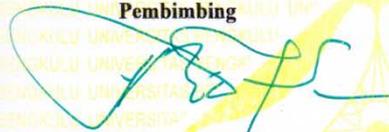
Tempat : Ruang Multimedia

Dan dinyatakan LULUS

DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Penguji Utama



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., N.Sc., Ak

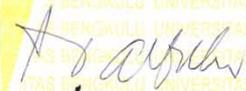
Chairil Afandi, S.E., M.M

NIP 19600915 198903 1 004

NIP 19790305 2000212 1 005

Anggota I

Anggota II



Dr. Fahrudin Js Pareke, S.E., M.Si

Dr. Drs. Syaiful Anwar, A.B., S.U

NIP 19710914 199903 1 004

NIP 19571010 198403 1 004

Mengetahui,

A.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Fahrudin Js Pareke, S.E., M.Si

NIP 19710914 199903 1 004

## MOTTO

- YOU CAN RUN BUT YOU CAN'T HIDE
- STUDENT TODAY, LEADER TOMORROW
- Jangan berfikir bagaimana hari esok akan terjadi, tetapi berfikirilah apa yang akan dilakukan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

## Persembahkan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang maha Esa
2. Kedua Orang Tua saya Bapak Bernad Sihombing dan Ibu Sarli Sibagariang
3. My sister Nova natalia and Yohana Dewi Abriani
4. My Beloved Elnita Regiyanti Simbolon yang selalu menemani dan memberikan semangat
5. Teman Teman terbaik Manajemen A angkatan 2010 terkhusus untuk anak finance ami, lia, meily, vivi, syah, rio, kevin, billy thanks buat kebersamaan selama ini.
6. Teman teman Terbaik Manajemen A 2010 yang lain ian, yogi, hannur, puspita, fenny, wulan, danti, dan teman teman yang lainnya.
7. Tema-teman seperjuangan KKN kelompok 96 nike, ferlin, annisa, edris, tommy, herdyan, tirta.
8. Teman Teman MABES DEVERIO.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hermanto Pandehotman

NPM : C1B010004

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis telah diacu di daftar pustaka.

Apabila saya melakukan pengajuan dari skripsi orang lain yang saya akui sebagai hasil karya saya sendiri, baik secara sengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri dan saya siap menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,



**Hermanto Pandehotman**

**C1B010004**

**“Analysis Of Trend Forecasting Effectiveness Of Motor Vehicle Tax Revenues And Motor Vehicle Transfer Tax in Revenue Office Of Bengkulu Year 2008-2012”**

By : Hermanto Pandehotman <sup>1)</sup>

Ridwan Nurazi <sup>2</sup>

*ABSTRACT*

This research aims to analysis and examine the effectiveness of motor vehicle tax revenues and motor vehicle transfer tax of Bengkulu Province in 2008-2012. This research also aims to predict Motor Vehicle Tax Revenues (PKB) and Motor Vehicle Transfer Tax ( BBN - KB ) of Bengkulu 2013-2017 which can be used as a reference to set targets for the year. This research is a descriptive analysis that explains the variables studied. This research uses Trend Analysis Method specifically variable forecasting method in the coming period. The object of research is the Local Revenue Office (DISPENDA) of Bengkulu province. This research analyzed the target of PKB and BBN - KB that had been set by the Provincial Government who then saw its effectiveness by comparing with the realization that had been achieved by DISPENDA of Bengkulu province by using the effectiveness formula. Result from the research showed increasing of PKB and BBN - KB local revenue in 2008-2012. This result demonstrated the effectiveness of realization to the targets that set by the government of Bengkulu province. In 2008, the realization of PKB Revenues reached 105.02 % and continued to increase until the end of the research, namely in 2012 reached 110.50%. At BBN – KB in 2008, the realization of BBN - KB reached 93.95 % and continued to rising. At the end of 2012, the effectiveness of the BBN - KB decreased by 93.17%. While the forecasting results in 2013 also increased from Rp. 157.391.381.000 to Rp. 404.303.275.121 in 2017. From the research results, it can be concluded that Revenue of PKB and BBN - KB is very effective.

**Keyword** : Motor vehicle tax (PKB), transfer tax motor vehicle (BBN-KB), trend analysis

<sup>1)</sup> A student of the economics and bussiness faculty

<sup>2)</sup> A Paper Supervisor

**Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012”**

By : Hermanto Pandehotman <sup>1)</sup>

Ridwan Nurazi <sup>2</sup>

**Ringkasan**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana yang digunakan untuk belanja daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah harus memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu dari sekian banyak sumber PAD adalah Pajak daerah. Pajak daerah berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan data target dan realisasi yang ada di Dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu. Penelitian merupakan penelitian analisis deskriptif yang artinya mendeskripsikan objek yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Sugiyono,1997:7). Penelitian ini menggunakan metode Analisis Trend Peramalan Kuadratik untuk meramalkan trend pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) selama 5 tahun kedepan (2013-2017).

Hasil dari penelitian ini menggambarkan efektivitas realisasi pendapatan PKB dan BBN-KB. Pada pendapatan PKB setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan. Pada tahun 2008 pendapatan PKB sebesar Rp.60.462.207.000. Pada akhir periode tahun 2012 pendapatan PKB meningkat sebesar 110,50% menjadi Rp.127.547.813.000. Hasil peramalan juga menunjukkan peningkatan pendapatan di bidang PKB. Pada tahun 2012 pendapatan PKB sebesar Rp. 127.547.813.000 diramalkan meningkat menjadi Rp.318.739.517.580.

Peningkatan pendapatan juga terjadi pada BBN-KB. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan BBN-KB sebesar Rp.93.872.427.500. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi Rp.157.391.381.000. Hasil peramalan BBN-KB juga menunjukkan peningkatan pendapatan. Pada tahun 2012 pendapatan BBN-KB sebesar Rp.157.391.381.000 diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.404.303.275.121.

Dari data peramalan yang sudah di teliti dapat disimpulkan Pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor akan terus meningkat hingga tahun 2017. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan usaha dari Dispenda seperti memaksimalkan sistem pembayaran online yang dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya.

**Kata kunci** : Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), analisis trend

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2008-2012”**. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Sebagai manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan dalam menyusun skripsi ini, hal ini dikarenakan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E. M.Sc. Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, mengoreksi, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama penelitian ini berlangsung hingga tersusunnya skripsi ini.
2. Bapak Chairil Afandy, S.E., M,M selaku ketua penguji utama yang dengan sabar memberikan arahan sehingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Dr. Fahrudin JS Pareke. S.E., M.Si selaku penguji anggota II
4. Bapak Dr. Drs. Syaiful Anwar, AB., S.U selaku penguji anggota III dan selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

5. Seluruh Dosen jurusan Manajemen yang dengan Ikhlas memberikan segala ilmunya kepada penulis.
6. Karyawati dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu setiap saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan isi skripsi ini sangatlah penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak bila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan pengetahuan.

Bengkulu, 19 Februari 2014

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Pajak .....	7
2.2 Fungsi Pajak .....	8
2.3 Jenis Pajak .....	9
2.4 Syarat Pajak.....	10
2.5 PKB dan BBN-KB .....	11
2.6 Pengelolaan keuangan .....	13
2.7 Teori Peramalan .....	16

2.8 Teori Efektivitas .....	17
2.9 Analisis Trend .....	19
2.10 Penelitian Terdahulu .....	21
2.11 Kerangka Analisis .....	24

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Sampel dan Populasi .....	26
3.3 Jenis dan Sumber data .....	26
3.4 Definisi Oprasional .....	27
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.6 Metode Analisis.....	28
3.6.1 Metode analisis Tren Kuadratik .....	28
3.6.2 Metode Efektivitas .....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah.....	30
4.2 Perkembangan Jumlah kendaraan bermotor.....	33
4.3 Perkembangan target dan realisasi PAD .....	34
4.4 Analisis Data	
4.4.1 Pertumbuhan realisasi pendapatan PKB.....	37
4.4.2 Analisis Trend Kuadratik PKB.....	38
4.4.3 Pertumbuhan pendapatan BBN-KB.....	42
4.4.4 Analisis Trend kuadratik BBN-KB .....	44
4.5 Pembahasan .....	48

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan..... 50

5.2 Saran..... 51

**DAFTAR PUSTAKA ..... 52**

**LAMPIRAN..... 54**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kriteria Presentase .....	29
Tabel 4.1 : Daftar UPPP daerah. Kabupaten provinsi Bengkulu .....	31
Tabel 4.2 : Perkembangan Jumlah pajak kendaraan bermotor .....	33
Tabel 4.3 : Pertumbuhan Target dan realisasi PAD Provinsi Bengkulu Tahun2008-2012 .....	35
Tabel 4.4 : Laporan Efektivitas Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012.....	37
Tabel 4.5 : Analisis Trend Pendapatan Pajak kendaraan bermotor Dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012.....	39
Tabel 4.6 : Tabel efektivitas pertumbuhan BBN-KB provinsi Bengkulu tahun 2008-2012.....	43
Tabel 4.7 : Analisis trend realisasi pendapatan BBN-KB dinas pendapatan daerah provinsi bengkulu tahun 2008-2012.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Analisis .....	25
Gambar 4.1 Pertumbuhan Kendaraan bermotor 2008-2012 .....	34
Gambar 4.2 Trend Pertumbuhan target dan realisasi PAD 2008-2012.....	36
Gambar 4.3 Trend Pertumbuhan Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan bermotor 2008-2012 .....	38
Gambar 4.4 Trend peramalan kontribusi pajak kendaraan bermotor 2013-2017 .	41
Gambar 4.5 Trend Efektivitas Realisasi Pendapatan BBN-KB 2008-2012.....	43
Gambar 4.6 Trend pendapatan BBN-KB provinsi bengkulu 2013-2017.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi DISPENDA .....	55
Lampiran 2 Visi & Misi DISPENDA .....	56
Lampiran 3 Gambaran umum provinsi Bengkulu.....	57
Lampiran 4 Pajak Pendapatan asli daerah tahun 2008-2012 .....	65
Lampiran 5 Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2008-2012 .....	66
Lampiran 6 Bea Balik Nama kendaraan bermotor tahun 2008-2012 .....	67
Lampiran 7 Data Awal PKB dan BBN-KB Provinsi Bengkulu .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan pelayanan Negara kepada rakyatnya. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, tiap-tiap daerah berhak untuk mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan keNegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan daerah. Pemberian otonom kepada daerah mengakibatkan timbulnya wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri. Untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri tidaklah membutuhkan dana yang sedikit melainkan dana yang besar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kewenangan pemungutan jenis pajak daerah yang didasarkan atas Provinsi kewenangan yang diberikan kepada daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu meningkatkan PDRB Bengkulu yang meningkat pada tahun 2009 sebesar 9,551 Juta rupiah menjadi 10,527 Juta rupiah pada tahun 2010 atau meningkat 10,22 Persen (BPS: 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana perimbangan dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang ada di Negara Republik Indonesia. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Berikut ini Total Pendapatan Asli daerah beserta sumber dan persentase pajak terhadap PAD tahun 2008-2011:

<b>PAD</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Restribusi Daerah</b>	<b>Hasil kekayaan daerah Yang dipisahkan</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah</b>
342.218	252.696	39.482	10.778	39.261
Persentase	73,80%	11,50%	3,10%	11,50%

(dalam Jutaan Rupiah)

Pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat (Rani:2012).

Pajak daerah di Provinsi Bengkulu salah satunya bersumber dari Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak kendaraan diatas air (PKA), bea balik nama kendaraan diatas air (BBN-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Setiap jenis pajak yang ada di Provinsi Bengkulu harus dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sehingga Penerimaan pajak dapat digunakan untuk melaksanakan pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang kendaraan bermotor yaitu dengan mendirikan sistem administrasi manunggal dibawah satu atap atau yang biasa dikenal dengan sebutan SAMSAT (Satuan Manunggal Satu Atap) (Niken damayanti: 2008). Namun seiring dengan berjalannya waktu maka nama SAMSAT kini diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Dengan adanya DISPENDA maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat karena pendapatan pajak kendaraan menjadi lebih terkoordinasi.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan salah satu sumber pendapatan di Provinsi Bengkulu, hal ini dibuktikan dari kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2008 yang mencapai 20,81%, tahun 2009 mencapai 20,86%, tahun 2010 mencapai 24,23%, tahun 2011 mencapai 23,70% dan tahun 2012 mencapai 26,37%. Sementara itu pada bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang lebih besar dari pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2008 sebesar 33,94%, pada tahun 2009 sebesar 22,82%, pada tahun 2010 sebesar 32,43%, pada tahun 2011 sebesar 36,17% dan pada tahun 2012 sebesar 32,53%. Data tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki peran dalam meningkatkan PAD Provinsi Bengkulu. Pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan persentase pendapatan. Berdasarkan Informasi yang di peroleh, penurunan ini terjadi karena mulai banyak beredar lising di Provinsi Bengkulu

dan juga dikarenakan banyaknya wajib pajak yang menunggak membayar pajak pada tahun 2009 tersebut.

Melihat besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka penulis ingin mengetahui seberapa besar efektivitas pencapaian Realisasi dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pendapatan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang akan di kontribusikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008-2012. Disamping itu penulis juga ingin meramalkan pendapatan PKB dan BBN-KB pada tahun berikutnya maka penelitian ini berjudul “ **Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Trend Efektivitas pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Efektivitas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012.
2. Bagaimana Trend Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Tahun 2013-2017.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Trend Efektivitas Pendapatan PKB dan BBN-KB Tahun 2008-2012.
2. Untuk Meramalkan Trend Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2013-2017.

### **1.2 Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan penulis tentang kontribusi PKB dan BBN-KB, dan juga menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama serta menambah referensi.

#### **B. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengolah penerimaan khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Para pakar banyak yang mengemukakan definisi pajak atau batasan pajak, yang satu sama lain pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pajak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

Andriyani dalam Waluyo (2007):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Soemitro dalam Siti (2009):

“Pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Imam Wahyutomo (1994: 1):

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan UU yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung ditunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pendorong, penghambat/pencegah untuk mencapai tujuan yang ada.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka didapatkan unsur dan ciri-ciri dalam pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Unsur:

- a) Ada Masyarakat
- b) Berdasarkan Undang-undang
- c) Ada pemungut pajaknya
- d) Ada wajib pajaknya
- e) Ada obyek pajaknya

2. Ciri-ciri pada pengertian pajak:

- a) Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
- b) Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan atau menggunakan surat paksa.
- c) Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang.
- d) Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidentil.
- e) Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal balik secara langsung.
- f) Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur.

## 2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain- lain.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah (PPnBM) pada saat terjadi jual beli barang mewah.

### 2.3 Jenis Pajak

Mardiasmo (2008) mengatakan Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.

- c) Pajak Hiburan.
  - d) Pajak Reklame.
  - e) Pajak Penerangan Jalan.
  - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
  - g) Pajak Parkir.
- Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
    - a) Pajak negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
    - b) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

#### **2.4 Syarat Pajak**

Adam Smith (dalam Mardiasmo, 2002: 18) mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak. Dikatakan agar supaya pemungutan pajak dinilai adil harus dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Equity* mengandung arti, dalam keadaan yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak sama pula. Contoh: Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sama, bukan terhadap penghasilan yang sama, karena dalam PKP sudah diperhitungkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana PTKP ini tidak sama bagi

setiap wajib pajak, jadi meskipun penghasilan sama, namun pajaknya belum tentu sama.

2. Syarat *Certainty* atau kepastian adalah tujuan dari setiap Undang-undang. Kepastian hukum adalah penting, untuk itu peraturan yang akan dibuat, harus diusahakan agar jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak membuat peluang untuk ditafsir lain, terutama mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. Syarat *Convenience of payment* mengandung arti pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan seperti karyawan atau pegawai, akan lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji atau honorium, apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan.
4. Syarat *Efficiency* adalah yang bertalian dengan biaya pemungutan. Para pembuat peraturan wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutannya harus lebih rendah dibanding dengan pemasukan pajaknya.

## **2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Kepmendagri No. 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 1).

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri No. 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar (Pasal 5 ):

- a) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 1% untuk kendaraan bermotor umum
- c) 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sedangkan Pembagian Hasil Penerimaan PKB dibagi sebagai berikut (Pasal 8):

1. 70% untuk daerah Propinsi
2. 0% untuk daerah Kabupaten/Kota

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Kepmendagri No. 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 4). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut (Pasal 9):

1. Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama sebesar:
  - a) 10% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
  - b) 10% untuk Kendaraan Bermotor umum
  - c) 3% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
2. Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua:
  - a) 1% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
  - b) 1% untuk Kendaraan Bermotor umum
  - c) 3% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Berat dan alat-alat besar
3. Tarif Kendaraan Bermotor karena warisan ditetapkan
  - a) 0,1% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
  - b) 0,1% untuk Kendaraan Bermotor umum
  - c) 0,03% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat.

Hasil Penerimaan BBN-KB diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 30% dengan memperhatikan aspek pemerataan potensi daerah.

## **2.6 Pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah**

Dalam Otonomi daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara mandiri. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bukan berarti mengeksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi tingginya. Karena jika Otonomi daerah di artikan sebagai exploitasi, maka masyarakatnya lah yang akan terbebani dengan otonomi daerah tersebut.

Pemerintah dapat menetapkan suatu jenis pajak baru. Namun menurut Devas (dalam Mardismo 2002: 150) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak, yaitu:

1. Hasil/perolehan pajak (*tax yield*), meliputi:
  - a) Hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (*tax payer resistance*);
  - b) Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja;
  - c) Perbandingan antara biaya pungut dengan hasil pajak kecil.
2. Keadilan (*Equity*)
  - a) Dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban wajib pajak harus jelas.
  - b) *Horizontal equity*. Pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horisontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama.
  - c) *Vertical equity*. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi dari pada yang miskin.
  - d) *Benefit principle*. Mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi.

3. Daya Guna Ekonomi. Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), terdapat dukungan kapasitas administrasi dan skill aparat yang memadai.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah
  - a) Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah tempat dimana orang tersebut bekerja.
  - b) Kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
6. Pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak. Jika jenis pajak atau tarif pajak berbeda-beda untuk tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak (misalnya memindahkan kantor pusat). Idealnya, pajak daerah dapat meminimalkan distorsi yang menyebabkan masyarakat dan pelaku bisnis meninggalkan suatu daerah.
7. Masalah keadilan antarwilayah. Beberapa pemerintah daerah memiliki potensi pajak daerah yang lebih besar dari yang lainnya. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antardaerah dari segi potensi masing-masing daerah

## 2.7 Teori Peramalan

Peramalan adalah penggunaan data atau informasi untuk menentukan kejadian pada masa depan, dalam bentuk perhitungan atau prakiraan dari data yang lalu dan informasi lainnya untuk penelitian terlebih dahulu prakiraannya (Ferdinand, 2011).

Di dalam melakukan suatu peramalan terdapat yang namanya meramal horizon waktu. Menurut Jay Heizer dan Barry Render Dalam Edward (2006) peramalan dibagi menjadi horizon waktu di bagi menjadi 3 yaitu:

a) Peramalan jangka pendek

Peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun tetapi umumnya kurang dari 3 Bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan tenaga kerja dan tingkat produksi.

b) Peramalan jangka menengah

Peramalan ini umumnya mencakup tentang hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan penjualan perencanaan dan anggaran produksi anggaran kas dan menganalisis bermacam macam rencana operasi.

c) Peramalan jangka panjang

Peramalan ini umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan teori di atas, penelitian ini menggunakan horizon waktu jangka panjang. Karena penelitian ini menggunakan interval data 5 tahun untuk memprediksi data 5 tahun ke depan.

## **2.8 Teori Efektivitas**

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu telah ditetapkan. Beberapa pendapat para tokoh mengenai teori efektivitas antara lain sebagai berikut:

Kurniawan dalam Hasri (2005: 109)

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya”.

Sumaryadi dalam Hasri (2005: 105)

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut siagian dalam Hasri (2009) efektivitas dapat dilihat dari 3 faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor waktu

Faktor waktu disini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.

## 2. Faktor Kecermatan

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayanan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.

## 3. Faktor Gaya Pemberian Pelayanan

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasa digunakan dalam mengukur efektifitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya di sini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja sipelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan.

(Siagian 2009: 60)

Dari beberapa pendapat dan faktor diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Untuk mengukur tingkat efektivitas yang telah dicapai di dalam organisasi atau instansi dapat diukur dengan rumus  $E = R/T$  dengan perincian  $R =$  realisasi dan  $T =$  Target. Berdasarkan teori tersebut, efektivitas merupakan penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai (Edward Dkk, 2012).

## **2.9 Analisa Trend**

Analisa Trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.

Secara teoritis, dalam analisis *time series* yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak, maka semakin baik pula estimasi yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi peramalannya semakin jelek. Metode yang digunakan untuk analisis *time series* adalah:

1. Metode rata-rata (*Semi average method*)

Dalam metode ini data dibagi menjadi 2 bagian secara rata ( $K_1$  dan  $K_2$ ), dengan persamaan linier:

$$Y = a + bX$$

$a_1 = K_1$  untuk kelompok 1

$a_2 = K_2$  untuk kelompok 2

$$b = \frac{k_2 - k_1}{\text{tahun dasar 2} - \text{tahun dasar 1}}$$

## 2. Metode Kuadrat terkecil (*last square method*)

Dalam metode ini data juga dibagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok ganjil dan genap, dengan persamaan linear:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

## 3. Metode Trend Kuadratis (*quadratic trend method*)

Dalam metode ini keseluruhan data diukur untuk menemukan trend dari suatu deret waktu dengan persamaan non linear:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum x^4) - (\sum x^2 Y)(\sum x^2)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum x^2} \quad c = \frac{n(\sum x^2 Y) - (\sum x^2)(\sum Y)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2}$$

Dengan Persamaannya :  $Y = a + bX + c(X)^2$

## 4. Metode Trend Eksponensial (*exponentian Trend Method*)

Dalam metode ini persamaan  $Y = a(1+b)^X$ ,  $\ln Y = \ln a + X \ln (1+b)$

Untuk mencari koefisien a dan b:

$$a = \text{anti Ln} \left( \frac{\sum \ln Y}{n} \right) \quad b = \text{anti Ln} \left( \frac{\sum \ln Y}{\sum X} - 1 \right)$$

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Kurniawati, 2006	“Kontribusi pengutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) terhadap PAD Sulawesi Tengah periode 2002-2005	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2000-2005. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sulteng lebih dari 24% setiap tahunnya. Tahun 2005 kontribusinya mencapai nilai terbesar yakni sebesar 30,36%. Sedangkan Bea-Balik Nama Kendaraan bermotor memberikan kontribusi lebih dari 35% setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut, kontribusi PKB dan BBN-KB berfluktuasi.	Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pembahasannya yaitu membahas tentang Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor	Perbedaan dari penelitian ini adalah Objek nya yang berbeda yaitu di dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012
Yustiva, 2008	“Kontribusi Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah pada unit pelayanan pendapatan daerah kabupaten Pati periode 2002-2006”	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi PKB yang terendah ialah pada tahun 2002 sebesar 43,06% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2006 sebesar 54,91%. Sedangkan kontribusi BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 44,73% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2002 yakni sebesar 56,95%. Dari hasil perhitungan efektivitas PKB	Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pembahasannya yaitu membahas tentang Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor	Perbedaan dari penelitian ini adalah Objek nya yang berbeda yaitu di dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012

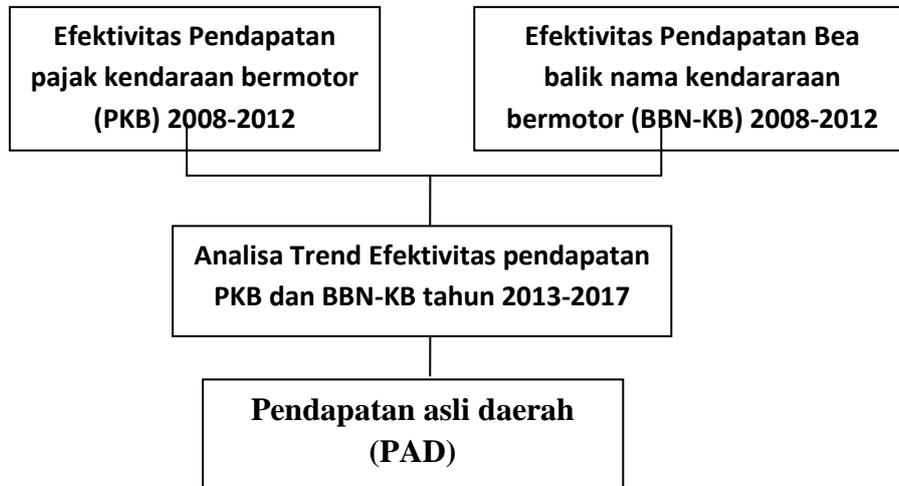
Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 114,53% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 132,85%. Sedangkan efektivitas BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 100,23% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2004 yakni 141,98%.</p>		
Rani, 2012	<p>“Kontribusi Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Tengah Tahun 2000-2010</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa selama kurun waktu 2000 hingga 2010 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah. Selama kurun waktu tersebut, Kontribusinya terhadap PAD Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi. Kontribusinya terendah yakni pada tahun 2006 sebesar 26,44% dan kontribusinya tertinggi yakni pada tahun 2002 sebesar 43,12%. Pajak kendaraan bermotor selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2010 memberikan kontribusi yang</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang pembahasannya, yaitu membahas tentang Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah objek nya yang berbeda, yaitu di dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012.</p>

Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		cukup besar setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, selama kurun waktu tersebut kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah berfluktuasi. Kontribusinya terendah yakni pada tahun 2000 sebesar 24,69%. Tahun 2008 kontribusinya merupakan yang tertinggi selama kurun waktu tersebut yakni sebesar 32,64%.		
Edward Ricardo Go, Jullie sondaks, Heince Wokas, 2012	“Analisis Penerimaan retribusi parkir kota Manado tahun 2008-2012”	Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam menggunakan analisis tiga selisih, didapati bahwa perusahaan mendapatkan selisih menguntungkan untuk biaya pemeliharaan mesin tetap yaitu pada selisih efisiensi karena unit yang diproduksi yaitu 1.750.000 kg lebih besar dari unit yang direncanakan yaitu sebesar 1.166.415 kg.	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian menggunakan analisis Trend Forecasting	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek nya yang berbeda yaitu di dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu tahun 2008-2012 dan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
Yunus (2012)	Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian menggunakan analisis Trend Forecasting	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek nya yang berbeda yaitu di dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu tahun 2008-2012 dan

Nama & Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		didukung oleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraup keuntungan.		bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
Rumagit (2011)	Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado sangat bergantung pada penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian menggunakan analisis Trend Forecasting	Perbedaan dari penelitian ini adalah objeknya yang berbeda yaitu di dinas pendapatan daerah provinsi Bengkulu tahun 2008-2012 dan bidang pajak kendaraan bermotor dan BBNKB

## 2.11 Kerangka Analisis

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh (Ferdinand, 2011), maka secara skematis kerangka pemikiran dalam mengkaji Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan Bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Analisis  
 Sumber : Ferdinand, 2011

Pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan sumber sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dan harus di kelola dengan baik melalui kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi (Rani: 2012). Untuk mendukung kebijakan terhadap efektivitas pendapatan yang akan di buat di tahun berikutnya maka dilakukan trend peramalan untuk membantu menetapkan kebijakan kebijakan di tahun berikutnya. Bila Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) akurat maka diharapkan Peramalan Trend PKB dan BBN-KB di tahun 2013-2017 akan menjadi efektif dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Analisis Deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono,1999:7).

#### **3.2 Sampel dan Populasi**

Populasi adalah suatu sebaran atau himpunan seluruh elemen sejenis dari suatu objek penelitian yang diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Soeparno, 2009:7). Dalam penelitian ini tidak menggunakan himpunan elemen atau populasi.

Sampel dalam statistik diartikan sebagai kelompok elemen yang menjadi bagian dari suatu populasi (Soeparno, 2009:8). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Data Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan Data PAD Provinsi Bengkulu tahun 2008-2012.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Untuk melaksanakan penelitian ini diperlukan data mengenai pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan daerah Provinsi Bengkulu. Jenis data yang digunakan dalam bentuk:

1. Data PAD provinsi Bengkulu
2. Data Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
3. Data Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Bengkulu
4. Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian

### **3.4 Definisi Oprasional**

Konsep oprasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) mengatakan secara umum PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat.
- b) Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri No. 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).
- c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Kepmendagri No. 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 4).

### 3.5 Metode pengumpulan data

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (sugiyono, 2007:193).

### 3.6 Metode Analisis

#### 3.6.1 Metode analisis Peramalan Trend Kuadratik (*Quadratic Trend Method*)

Alasan memilih menggunakan Trend kuadratik karena di dalam penelitian ini memiliki deret waktu yaitu dari tahun 2008-2012 dan dari tahun 2013-2017. Selain itu juga dikarenakan interval waktu di dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori peramalan jangka panjang atau lebih dari 3 tahun (5 tahun ). Dalam metode ini keseluruhan data diukur untuk menemukan trend suatu deret waktu, dengan persamaan non linear sebagai berikut:

$$Y = a + bX + c(X)^2$$

Untuk mencari koefisien a, b, dan c digunakan rumus:

- $a = \frac{(\sum Y)(\sum x^4) - (\sum x^2 Y)(\sum x^2)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2}$
- $b = \frac{\sum XY}{\sum x^2}$

- $$c = \frac{n(\sum x^2 Y) - (\sum x^2)(\sum Y)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2}$$

### 3.6.2 Mengukur Efektivitas Realisasi pendapatan PKB dan BBN-KB

Untuk mengukur efektivitas realisasi pendapatan PKB dan BBN-KB dari target yang diberikan maka dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria Persentase:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Persentase**

Diatas 100%	Sangat Efektif
90,01%-100%	Efektif
80,01%-90,00%	Cukup Efektif
60,00%-80,00%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Halim (2001)*